

**GOVERNMANET PUBLIC RELATIONS IN FACING POLITICAL YEAR:  
TRAINING FOR LOCAL GOVERNMENT OF MAGETAN**

**PELATIHAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DI KABUPATEN  
MAGETAN DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK**

**Rani Sukma Ayu Suteja\*<sup>1</sup>, Titik Puji Rahayu<sup>1</sup>, Irfan Wahyudi<sup>1</sup>,  
Suko Widodo<sup>1</sup>, Dina Septiani<sup>1</sup>, Santi Isnaini<sup>1</sup>, Intan Fitranisa<sup>1</sup>,  
Ratih Puspa<sup>1</sup>**

\*<sup>1</sup> Departemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Airlangga

\*e-mail: [rani.sukma@fisip.unair.ac.id](mailto:rani.sukma@fisip.unair.ac.id)

**Abstract**

*The issues faced by Indonesia in the 2019 elections are likely to reemerge in the 2024 elections. In the 2019 elections, digital media became a highly effective tool for disseminating information related to politics and governance. Unfortunately, not all information available on digital media was accurate. Social media, in particular, saw a lot of misinformation and the spread of fake news (hoaxes). This led to a negative perception of the government among the public, which consequently influenced the opinions and political participation of Indonesian society. Therefore, a transformation is needed to support the formation of a positive government image. One of the strategies is maximizing government public relations. On August 8, 2023, the Communication Department at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga, held a community service activity on the topic of government public relations training in Magetan Regency to address the political year. The main target of this activity was government officials in Bulukerto Subdistrict, Magetan District, Magetan Regency. The implementation mechanism consisted of three stages. In the initial stage, the community service team conducted surveys and coordinated with local government officials to gain a detailed understanding. During this stage, the Communication Department observed the involvement and performance of government public relations to obtain an initial overview of the strategies or designs used for the training. Subsequently, it was decided that the activity would be conducted through seminars and workshops covering topics such as public speaking, digital government, corporate social responsibility, and government public relations. After the activity, an evaluation was conducted to measure its success. It is hoped that this activity can serve as a foundation for improving the function of government public relations in addressing the political year and can be a supportive factor in ensuring the success of the 2024 elections.*  
**Keywords:** Government Public Relations; Election; Digital Government.

**Abstrak**

*Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia pada Pemilu 2019, berpotensi untuk muncul kembali pada Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019 lalu, media digital menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi terkait politik dan pemerintahan. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersedia di media digital itu benar adanya. Dalam media sosial, banyak pula terjadi disinformasi dan penyebaran berita bohong (hoaks). Hal ini kemudian mengarahkan pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah, sehingga berpengaruh*

Received 24 January 2024; Received in revised form 28 March 2024; Accepted 6 April 2024;  
Available online 15 June 2024.

 [10.20473/jlm.v8i2.2024.247-256](https://doi.org/10.20473/jlm.v8i2.2024.247-256)



Copyright: © by the author(s) Open access under CC BY-SA license

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

*pada opini dan partisipasi politik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan transformasi yang mampu mendukung terbentuknya citra positif pemerintah. Salah satunya melalui pemaksimalan government public relations. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik pelatihan government public relations di Kabupaten Magetan dalam menghadapi tahun politik. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah aparat pemerintah di Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Mekanisme pelaksanaan terdiri dari 3 (tiga) tahap. Pada tahap awal, tim pengabdian masyarakat melakukan survei dan koordinasi dengan pejabat pemerintah setempat untuk mendapatkan gambaran detail. Pada tahap ini, tim Departemen Komunikasi mengamati peran serta kinerja government public relations untuk mendapatkan gambaran awal terkait strategi atau rancangan yang digunakan untuk melakukan pelatihan. Selanjutnya, diputuskan kegiatan ini dilakukan melalui seminar dan workshop dengan materi yang meliputi public speaking, digital government, corporate social responsibility, dan government public relation. Setelah kegiatan selesai, dilakukan evaluasi guna mengukur keberhasilan. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi landasan peningkatan fungsi government public relations dalam menghadapi tahun politik dan dapat menjadi faktor pendukung untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.*

**Kata kunci:** Hubungan Publik Pemerintah; Pemilu; Pemerintahan Digital.

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada Pemilu 2019, berpotensi untuk muncul kembali pada Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019 lalu, media digital atau media sosial, menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi terkait politik dan pemerintahan. Sayangnya, tidak semua informasi yang tersedia di media digital itu benar adanya. Dalam media sosial, banyak pula terjadi disinformasi dan penyebaran berita bohong (hoaks). Hal ini kemudian mengarahkan pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah, sehingga berpengaruh pada opini dan partisipasi politik masyarakat Indonesia. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aminulloh et al. (2022), yang menunjukkan bahwa media sosial merupakan sumber hoaks yang dapat menjadi penyebab perpecahan dalam masyarakat dan buruknya citra pemerintah. Pada tahun politik, hoaks yang mengandung isu kebencian berbasis ras, agama, dan ideologi, tumbuh subur di media sosial. Masalah ini juga didukung dengan rendahnya pemahaman dan tindakan dari aparat pemerintah dalam membentuk citra positif di media sosial. Apalagi, terbukti bahwa media sosial sangat berperan dalam membentuk pemahaman dan perilaku masyarakat (Afdhal 2016).

Oleh karena itu, diperlukan transformasi yang mampu mendukung terbentuknya citra positif pemerintah (baik dalam level nasional maupun daerah), utamanya melalui media sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparat pemerintah pada logika serta cara kerja media digital. Harapannya, pemahaman ini dapat digunakan sebagai pendukung pengembangan literasi digital dan optimalisasi *government public relations* pada aparat pemerintah. Mengutip dari laman Kemkominfo (Kominfo 2016), *government public relations* (GPR) merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

Basis kerja *government public relations* adalah pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan publik terhadap

Program dan Kebijakan Pemerintah. Aparat pemerintah merupakan garda terdepan dalam membentuk citra pemerintah yang transparan dan akuntabel. Dengan peningkatan pemahaman dan keterampilan akan literasi digital serta *government public relations* oleh aparat pemerintah, diharapkan dapat menjadi pondasi agar Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan kondusif. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs) nomor 11 dan 16 tentang Kota dan Komunitas yang berkelanjutan serta Perdamaian, Keadilan dan Keilmuan yang Kuat, serta nomor 4, 5, dan 10 tentang kualitas edukasi, kesetaraan gender, dan pengurangan ketimpangan.

Dengan menimbang permasalahan di atas, Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik pelatihan *government public relations* di Kabupaten Magetan dalam menghadapi tahun politik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2023. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah aparat pemerintah di Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Analisis yang dilakukan oleh tim menunjukkan bahwa (1) rendahnya kualitas dan kuantitas ASN yang ada pada lokasi tersebut dan (2) minimnya landasan pelayanan dan pembangunan e-government, menjadi dasar pentingnya kegiatan ini untuk dilakukan. Kurangnya kualitas tersebut dapat terlihat dari beberapa kemampuan yang dimiliki ASN, terutama dalam bidang *public relations* dan pelayanan publik. Dengan masih banyaknya ASN yang memiliki pendidikan terakhir SMA/Sederajat dapat menjadi penyebab kurangnya kualitas pelayanan serta komunikasi kepada publik. Lembaga pemerintah dituntut untuk mampu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsinya (Dewi 2020). Sehingga, kemampuan dan pemahaman terhadap *public relations* menjadi salah satu kegiatan komunikasi yang ditujukan untuk membangun serta meningkatkan citra (Amalia 2020). Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan institusi pemerintahan dalam menghadapi tahun politik.

## **METODE PENGABDIAN MASYARAKAT**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan praktik *government public relations* pada aparat pemerintah pada kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. *Government public relations* menjadi satu dari banyak kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh ASN sebagai pelayan publik. Mekanisme pelaksanaan ditempuh oleh Departemen Komunikasi melalui 3 (tiga) tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pertama, pada tahap perencanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan survei dan koordinasi dengan pejabat pemerintah setempat untuk mendapatkan gambaran terkait masalah secara lebih mendetil. Pada tahap ini, tim Departemen Komunikasi mulai mengamati peran serta kinerja *government public relations* untuk mendapatkan gambaran awal terkait strategi atau rancangan yang digunakan untuk melakukan pelatihan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan seminar dan *workshop* dengan materi seputar (1) *public speaking*, (2) *digital government*, (3) *corporate social responsibility*, dan (4) *government public relation*. Penguatan kemampuan ini sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan citra positif pemerintah, yang kemudian dapat menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi tahun politik yang akan segera datang. Kemampuan ini menjadi salah satu penopang kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Rangkaian program ini diselaraskan dengan tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs) nomor 11 dan 16 tentang kota dan komunitas yang

berkelanjutan serta perdamaian, keadilan dan keilmuan yang kuat. Terakhir adalah tahap evaluasi yang berisi penulisan laporan akhir dan publikasi kegiatan. Pengukuran peningkatan pengetahuan mitra pasca penyampaian materi dilakukan melalui metode diskusi partisipatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada era kemajuan teknologi dan informasi seperti saat ini, peran humas bukan lagi sebagai penyampai informasi semata. Humas di masa kini, menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah. Humas bertanggungjawab untuk menciptakan reputasi kinerja pemerintahan yang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, saat ini peran humas dikembangkan lagi secara proaktif agar dapat mengemas informasi dengan baik, membentuk citra positif pemerintah, dan mampu menekan adanya berita miring yang berkembang di kalangan masyarakat, yang dapat menyebabkan persepsi negatif pada pemerintah. Dalam hal ini, humas pemerintah diwajibkan untuk dapat menyediakan informasi yang benar dan sesuai fakta, serta berimbang dan proporsional. Humas pemerintahan dikenal dengan istilah *government public relations* (Lani and Handayani 2021). Program kerja *government public relations* antara lain: (1) pemerintah sebagai penentu agenda (*agenda setting*) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya, (2) membentuk lembaga jejaring komunikasi, (3) menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D, (4) menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia (Kominfo 2016). Seorang praktisi PR, khususnya PR pemerintahan harus memiliki kepekaan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat (Kadarisman 2021).

Menurut Phillips and Young (2013), semua institusi di masa kini sangat bergantung pada media digital khususnya media sosial, untuk mendongkrak citra positif. Dalam konteks pemerintah Indonesia, media digital digunakan untuk mendiseminasikan informasi terkait kegiatan pemerintah yang pada akhirnya mampu menghubungkan antara pemerintah, masyarakat dan juga organisasi yang lain. Lebih lanjut Nepal, Paris, and Georgakopoulos (2015) menyatakan bahwa di sektor pemerintahan, media sosial digunakan untuk banyak hal, seperti kegiatan pengabdian pada masyarakat, manajemen resiko, perencanaan, dan kampanye program dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini didukung oleh karakteristik platform media digital yakni interaktif sehingga mampu mengembangkan budaya *sharing, transparency, openness, collaboration* (STOC). Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, diharapkan insitusi pemerintahan mampu menampilkan citra yang baik, apalagi Indonesia sedang memasuki tahun politik. Selain itu, konsisten menggunakan media sosial juga dapat mendukung hal tersebut (Verawati & Anwar, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, Departemen Komunikasi mengadakan kegiatan ini melalui seminar dan workshop dengan materi mencakup (1) *public speaking*, (2) *digital government*, (3) *corporate social responsibility*, dan (4) *government public relation*. Hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan mitra berdasarkan hasil survei dan observasi pra-pelaksanaan kegiatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pengabdian masyarakat terlebih dulu melakukan audiens dengan Bupati Magetan yang bertempat di ruang Jamuan Pendapa Surya Graha Magetan. Audiensi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenal lebih dalam mengenai potensi dan kendala perkembangan kabupaten Magetan, serta



untuk menjalin silaturahmi dengan mitra pengabdian masyarakat. Pada kegiatan audiensi tersebut, Bupati Magetan menyambut dengan baik kehadiran tim dari Departemen Komunikasi dan berharap agar kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki dampak jangka panjang dan keberlanjutan bagi Kabupaten Magetan, yang memang sedang gencar melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Diharapkan juga, kegiatan ini dapat dilakukan juga di tahun-tahun berikutnya, dengan sasaran audiens yang berbeda. Setelah audiensi dilakukan, tim berangkat menuju kelurahan Bulukerto yang bertempat tidak jauh dari pendapa kabupaten untuk melakukan kegiatan utama.



Gambar 1. Audiensi dengan Bupati Magetan.

Materi pertama yaitu *public speaking* atau wicara publik, adalah kemampuan yang sangat diperlukan, terutama bagi seorang ASN sebagai pejabat dan pelayan publik. Wicara publik adalah teknik menyampaikan pesan atau seni berkomunikasi dengan publik atau audiens. Wicara publik merupakan bagian dari strategi komunikasi yang efektif (Girsang 2018). ASN sebagai pihak yang banyak bertemu dan berkomunikasi dengan banyak pihak, wajib memiliki kemampuan wicara publik yang mumpuni untuk menghindari adalah kesalahan komunikasi. Penguasaan kemampuan ini dapat meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas seorang ASN sebagai aparat pemerintah. Pada materi pertama ini, pada aparat kelurahan Bulukerto, tidak hanya diberikan materi, tetapi juga diminta untuk mempraktikkan secara langsung, bagaimana wicara publik yang baik dan benar.

Materi kedua yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Departemen Komunikasi adalah mengenai *digital government*. Materi ini disampaikan karena adanya urgensi terkait belum meratanya praktik *digital government* di Indonesia. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, semua institusi dituntut untuk mengembangkan sistem pelayanan dan administrasi agar berbasis elektronik. Inilah yang disebut dengan *digital government*. *Digital government* pada intinya merupakan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sebagai alat bantu dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien dari segala aspek (Setyawati and Fitriati 2023). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.

Dengan mengedepankan sistem kerja *digital government*, baik aparat pemerintah maupun masyarakat Kelurahan Bulukerto, dapat mengakses layanan publik darimana saja. *Digital government* bisa meliputi optimalisasi situs web dalam menyediakan fitur-fitur pelayanan publik, seperti penyediaan informasi, pengurusan surat atau dokumen administrasi publik, layanan saran dan kritik masyarakat, dan lain-lain. Selain itu, *digital government* juga meliputi penyediaan informasi melalui media sosial agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pula karena pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, cepat dan transparan. Materi ini disampaikan melalui seminar, guna memberikan wawasan betapa pentingnya mengembangkan *digital government*.

Selanjutnya, materi ketiga adalah mengenai CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggungjawab sosial institusi. CSR merupakan tanggung jawab institusi pada lingkungan sekitarnya. CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi untuk memberi kontribusi dan peran aktif dalam menjaga lingkungan sekitar dengan tujuan pembangunan sosial. Di era globalisasi saat ini, pemahaman aparat pemerintah mengenai CSR masih sangat kurang (bkn.go.id 2019). Padahal, ASN dituntut untuk berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan global (mediaindonesia.com 2019). Dalam hal ini, ASN perlu memahami apa itu CSR. Hal ini bertujuan agar ASN memiliki wawasan mengenai pentingnya melakukan sinergi dengan berbagai lembaga lain dalam masyarakat untuk memaksimalkan pelayanan dan juga mengembangkan potensi daerahnya. Materi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan dari pihak Kelurahan Bulukerto, karena pada tanggal 9 Agustus 2023 akan dilakukan peresmian Kampung Bahasa dan Kuliner di wilayah kelurahan tersebut (kominfo.magetan.go.id 2023). Tujuan pendiriannya adalah pemberdayaan masyarakat agar mampu berbahasa asing dan juga pemberdayaan UMKM setempat. Pendirian kampung ini merupakan hasil sinergi dengan berbagai perusahaan dan lembaga melalui pemaksimalan dana CSR. Oleh karena itu, dengan penyampaian materi mengenai CSR, diharapkan aparat pemerintah kelurahan Bulukerto dapat memahami pentingnya CSR, kemudian mampu memaksimalkan dan menjaga keberlanjutan dari program-program CSR. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Materi keempat yaitu *government public relations* atau humas pemerintah. Hal ini merupakan salah satu elemen penting bagi sebuah institusi pemerintahan. Materi ini merupakan materi inti dari kegiatan pengabdian masyarakat Departemen Komunikasi tahun 2023. Materi mengenai *government public relations* berfokus pada peningkatan wawasan aparat pemerintah Kelurahan Bulukerto dalam menciptakan citra positif di mata masyarakat. Citra institusi pemerintah di mata masyarakat dapat dibentuk melalui bagaimana aparat mampu menjalin hubungan yang baik dengan publik agar kepercayaan dapat diraih, bagaimana humas mengatasi masalah di masyarakat, dan lain sebagainya. Hal ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam hal keterbukaan informasi publik. Selain itu, salah satu fungsi dari *government public relations* adalah sebagai jembatan pemerintah dengan masyarakat dalam hal komunikasi program-program pemerintahan dan pelayanan publik (Djusan 2013). Ini dapat dilakukan melalui pemaksimalan kemampuan dan kompetensi yang telah disampaikan pada 3 (tiga) materi sebelumnya.



Gambar 2. *Penyampaian materi oleh salah satu narasumber.*

Adapun materi pertama dan kedua disampaikan oleh Irfan Wahyudi, S.Sos, M.Comm, Ph.D, selanjutnya materi ketiga dan keempat disampaikan oleh Dr. Suko Widodo, Drs, M.Si, kemudian untuk sesi praktik dan tanya jawab dipandu oleh Dr. Santi Isnaini, S.Sos, MM dan Dina Septiani B.Comm, M.Comn, Ph.D. Keempat narasumber merupakan dosen aktif Departemen Komunikasi FISIP UNAIR yang kompetensinya sesuai dengan materi yang disampaikan.

Peserta pelatihan tidak hanya sekadar mengikuti acara, tetapi mereka juga terlibat secara aktif. Dalam setiap sesi, peserta terlihat bersemangat untuk memahami konsep-konsep dasar *digital government* dan *government public relations* yang disampaikan oleh pemateri. Setelah semua materi disampaikan, pengukuran peningkatan pengetahuan mitra pasca penyampaian materi dilakukan melalui metode diskusi partisipatif bersama peserta yang merupakan aparat pemerintah kelurahan Bulukerto dan juga Lurah Bulukerto sendiri yaitu Ibu Widya Yusti Atlisiaji, M.Med.Kom. Pada tahap ini, dilakukan diskusi mengenai bagaimana rencana implementasi dan peningkatan *government public relations* di kelurahan Bulukerto. Diskusi ini meliputi masalah dan studi kasus yang dihadapi oleh kelurahan Bulukerto dan bagaimana penyelesaiannya menggunakan pengetahuan yang sudah didapat dari penyampaian materi. Pada diskusi ini, didapatkan kesimpulan bahwa peserta mampu menghubungkan materi yang sudah disampaikan dengan studi kasus di kelurahan. Berdasarkan hal tersebut, salah satu rencana implementasi dan peningkatan fungsi *government public relations*, akan dimulai dari pemaksimalan layanan masyarakat melalui *website* bulukerto.magetan.go.id. Selanjutnya, aparat kelurahan akan mulai membangun layanan penyediaan informasi melalui media sosial dan program lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dari sini, tim pengabdian masyarakat dapat menyimpulkan bahwa substansi kegiatan dapat diterima baik oleh peserta.

Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menghasilkan beberapa publikasi di media online (tabel 1) sebagai berikut:

Tabel 1. Publikasi Kegiatan Pada Media Online

Judul Berita	Tautan Berita
Masuki Tahun Politik, Departemen Ilmu Komunikasi Lakukan Pengabdian Masyarakat Terkait Literasi Media	<a href="https://fisip.unair.ac.id/masuki-tahun-politik-departemen-ilmu-komunikasi-lakukan-pengabdian-masyarakat-terkait-literasi-media/">https://fisip.unair.ac.id/masuki-tahun-politik-departemen-ilmu-komunikasi-lakukan-pengabdian-masyarakat-terkait-literasi-media/</a>
Audiensi Bersama Tim Pengabdian Masyarakat Unair	<a href="https://koinfo.magetan.go.id/audiensi-bersama-tim-pengabdian-masyarakat-unair/">https://koinfo.magetan.go.id/audiensi-bersama-tim-pengabdian-masyarakat-unair/</a>
Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unair Ajak Masyarakat Magetan Waspada Hoak Politik.	<a href="https://rasifm.co.id/melaksanakan-kegiatan-pengabdian-kepada-masyarakat-unair-ajak-masyarakat-magetan-waspada-hoak-politik/">https://rasifm.co.id/melaksanakan-kegiatan-pengabdian-kepada-masyarakat-unair-ajak-masyarakat-magetan-waspada-hoak-politik/</a>
Masuki Tahun Politik, Departemen Ilmu Komunikasi Lakukan Pengabdian Masyarakat Terkait Literasi Media	<a href="https://unair.ac.id/post_fetcher/fisip-masuki-tahun-politik-departemen-ilmu-komunikasi-lakukan-pengabdian-masyarakat-terkait-literasi-media/">https://unair.ac.id/post_fetcher/fisip-masuki-tahun-politik-departemen-ilmu-komunikasi-lakukan-pengabdian-masyarakat-terkait-literasi-media/</a>
Tim Pengmas UNAIR Terjun ke Masyarakat Kelurahan Bulukerto, Gelar Pelatihan GPR	<a href="https://prokopim.magetan.go.id/tim-pengmas-unair-terjun-ke-masyarakat-kelurahan-bulukerto-gelar-pelatihan-gpr/">https://prokopim.magetan.go.id/tim-pengmas-unair-terjun-ke-masyarakat-kelurahan-bulukerto-gelar-pelatihan-gpr/</a>

## PENUTUP

**Simpulan.** Pelaksanaan kegiatan masyarakat ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar sesuai perencanaan. Materi yang disampaikan telah sesuai dengan kebutuhan mitra yaitu Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Tim juga mendapat sambutan yang baik dari Bupati Magetan yang juga sedang melakukan transformasi pemerintahan Kabupaten Magetan. Materi yang telah disampaikan, diharapkan dapat menjadi landasan peningkatan fungsi *government public relations* dalam menghadapi tahun politik dan dapat menjadi faktor untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pengetahuan dari peserta. Hal ini ditunjukkan melalui diskusi partisipatif pasca penyampaian materi terkait studi kasus yang dihadapi oleh peserta.

**Saran.** Untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang selanjutnya dapat dilakukan di kelurahan yang lainnya di Kabupaten Magetan, agar pemahaman mengenai *government public relations* dapat lebih merata untuk keberlanjutan yang lebih berdampak positif.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami berikan kepada Universitas Airlangga dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas dukungannya sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Bupati Magetan, Dr. Drs. Suprawoto, SH, M.Si dan Lurah Bulukerto, Widya Yusti Atlisiaji, M.Med.Kom atas sambutan baiknya. Terima kasih juga disampaikan kepada Kelurahan Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan sebagai mitra kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, R. 2016. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Membangun Citra Positif Melalui Media Online (Studi Pada Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Malang)." *Jurnal Administrasi Publik*.  
<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1391>.
- Amalia, Viki. 2020. "Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Public Trust Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Di Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo)." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (March): 13–23.  
<https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i1.812>.
- Aminulloh, Akhirul, Fathul Qorib, Latif Fianto, and Emei Dwinanarhati Setiamandani. 2022. "Propaganda and Political Memes on Social Media in the 2019 Indonesian Presidential Election." *Journal of Islamic World and Politics* 6, no. 2 (December): 342–65. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i2.16115>.
- bkn.go.id. 2019. "Policy Brief Februari 2019." 2019. <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/Policy-Brief-Februari-2019.pdf>.
- Dewi, N. M. R. 2020. "Peran Humas Dalam Peningkatan Pelayanan Informasi Pada Kanwil DJKN Jawa." *Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. 2020.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/13117/Peran-Humas-Dalam-Peningkatan-Pelayanan-Informasi-pada-Kanwil-DJKN-Jawa-Barat.html>.
- Djusan, Aizirman. 2013. "Praktik Government Public Relations Paska Otonomi Daerah, Sebuah Tinjauan Dengan Kasus Penyuluh KB Sebagai Government Public Relations Bidang KB." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16, no. 1 (August): 61.  
<https://doi.org/10.31445/jskm.2012.160104>.
- Girsang, Lasmery Rosentauly Maissalinya. 2018. "'Public Speaking' Sebagai Bagian Dari Komunikasi EFEKTIF (Kegiatan Pkm Di SMA Kristoforus 2, Jakarta Barat)." *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan* 2, no. 2 (November).  
<https://doi.org/10.30813/jpk.v2i2.1359>.
- Kadarisman, Ade. 2021. "Government Public Relations Dalam Pengembangan Pariwisata Masa Pandemi COVID-19 Di Geopark Ciletuh." *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat* 5, no. 2 (February): 270–90.  
<https://doi.org/10.24198/prh.v5i2.29800>.

- Kominfo. 2016. "Lingkup Program Government Public Relations." Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. 2016. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/6857/lingkup-program-government-public-relations/0/pp\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6857/lingkup-program-government-public-relations/0/pp_gpr).
- kominfo.magetan.go.id. 2023. "Kelurahan Bulukerto Launching Kampung Bahasa Dan Kampung Kuliner." Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Magetan. 2023. <https://kominfo.magetan.go.id/kelurahan-bulukerto-launching-kampung-bahasa-dan-kampung-kuliner/>.
- Lani, Oktri Permata, and Beni Handayani. 2021. "Peranan Humas Pemerintahan (Government Public Relations) Dalam Menciptakan Reputasi Pemerintahan Yang Baik." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 2 (December): 130–40. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i2.4071>.
- mediaindonesia.com. 2019. "ASN Dituntut Inovatif Terhadap Tantangan Global." Media Indonesia. 2019. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/220761/asn-dituntut-inovatif-terhadap-tantangan-global>.
- Nepal, S, C Paris, and D Georgakopoulos. 2015. *Social Media for Government Service*. SPRINGER.
- Phillips, D, and P Young. 2013. *Online Public Relations: A Practical Guide to Developing an Online Strategy in the World of Social Media*. Kogan Page.
- Setyawati, Desy Nirmala, and Rachma Fitriati. 2023. "Digital Governance Dalam Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal Kebijakan Publik* 14, no. 1 (March): 48. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8217>.
- Verawati, Liesta, and Muhamad Syaeful Anwar. "Training of Social Media Marketing (Tiktok Shop And Facebook) In Stars Bakery, Kendal Regency For Business Promotion". *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 7, no. 4 (December 4, 2023): 589–598. Accessed January 24, 2024. <https://e-journal.unair.ac.id/jlm/article/view/48829>.